

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi terutang yang diwajibkan bagi wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan yang dibayarkan dimana bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana tidak memperoleh keuntungan secara langsung melainkan kontribusi pajak digunakan sebagai kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1) (Mufidah et al., 2020). Pajak juga salah satu sumber dana pemerintah untuk menandai pembangunan di pusat dan daerah. Pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai kebijakan moneter dalam memfasilitasi kehidupan masyarakat yang lebih baik kedepannya. Tanpa membayar pajak sebagian besar kegiatan Negara sulit untuk dapat dilaksanakan dimana pajak sumber yang paling utama bagi penerimaan negara.

Pada perusahaan pajak juga beban yang harus dimitigasi karena dapat mengurangi laba bersih perusahaan karena perusahaan tidak memperoleh manfaat atas pembayaran pajak, sehingga memungkinkan manajemen perusahaan untuk meminimalkan pajak yang sering disebut perencanaan pajak (Geo Putri et al., 2023). Pajak sangat berfungsi terhadap pembangunan negara dan sebagai kebijakan negara Indonesia di bidang sosial seperti APBN, sehingga pajak wajib bagi warga Negara Indonesia yang sudah menjadi subjektif dan obyektif bagi pajak orang pribadi wajib pajak.

Dalam konteks perpajakan, perencanaan pajak merupakan salah satu strategi yang umum dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar secara legal. Namun, perencanaan pajak yang agresif berpotensi memunculkan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal, yang pada akhirnya akan menghasilkan aset pajak tangguhan (*Deferred Tax Assets - DTA*) atau beban pajak tangguhan (*Deferred Tax Expense - DTE*). DTA timbul ketika pajak yang dibayar di masa depan lebih rendah dibandingkan dengan pajak yang dihitung berdasarkan laba akuntansi saat ini, sementara DTE terjadi sebaliknya.

Keberadaan DTA dan DTE ini menjadi menarik untuk diteliti dalam kaitannya dengan manajemen laba. Di satu sisi, perusahaan yang melakukan manajemen laba mungkin cenderung memanfaatkan perencanaan pajak untuk menyajikan laba yang lebih tinggi. Di sisi lain, keberadaan DTA dan DTE dapat menjadi sinyal bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya mengenai potensi adanya praktik manajemen laba.

Para pengguna laporan dapat dirugikan manajemen laba karena informasi yang terdapat pada laporan keuangan merupakan data hasil rekayasa bukan data yang sebenarnya, hal ini akan berdampak juga terhadap manajemen karena telah salah dalam pengambilan keputusan investasi. Kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi dapat mengakibatkan investasi yang tidak efisien, karena pihak manajemen tidak bisa mengolah dana yang telah diberikan investor (Yapono & Khomsatun, 2018).

Laporan keuangan yang baik menjadi sebuah keharusan bagi pihak manajemen untuk memberikan pengaruh terhadap investor maupun untuk

kepentingan pribadi . Oleh karena itu, pihak manajemen akan melakukan praktik manajemen laba. Dalam melakukan manajemen laba, manajer perusahaan akan mengubah metode maupun strategi akuntansi yang digunakan dengan tujuan mempengaruhi laporan keuangan.

Tabel 1.1
Data Perusahaan Yang Terlibat Kasus Kecurangan

No	Nama Perusahaan	Kasus Kecurangan
1	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	PT Tiga Pilar Tbk Sejahtera Food Tbk gagal membayar atas sukuk ijarah 1 tahun dengan pokok nilai Rp 300 miliar yang jatuh tempo pada 5 April 2018 dan Obligasi 1 tahun yang sama dengan nilai emisi Rp 600 miliar yang jatuh tempo pada 5 April 2018. Terdapat dugaan bahwa Direksi melakukan pengelembungan dana sejumlah Rp 6 triliun dan pengelembungan dana masuk senilai Rp 662 miliar serta pengelembungan dana lainnya senilai Rp 329 miliar pada pos EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi serta amortisasi) entitas industri makanan dari emiten tersebut.

		(CNBC Indonesia,2020).
2	PT Garuda Indonesia	<p>PT Garuda Indonesia berawal dari laba bersih yang dibukukan perusahaan di tahun 2018 sejumlah USD 809.846. Otoritas Jasa Keuangan dan Pegawai Pemerintahan melihat adanya ketidak benaran informasi yang disajikan pada laporan keuangan dan meminta PT Garuda Indonesia menyajikan ulang laporan keuangannya serta dikenakan denda sebesar Rp 100 juta. Pada akhirnya manajemen menyajikan kembali laporan keuangan untuk periode 2018 dengan menyajikan rugi bersih sejumlah USD175,028 juta. Sementara itu kasus lain yaitu PT Asuransi Jiwasraya merekayasa laporan keuangan dan diduga memanipulasi laba yang disajikan sebesar Rp 360,3 miliar rupiah di tahun 2006 dalam pemeriksaan investigasi pendahuluan oleh BPK. Sampai dengan September 2019, diperkirakan kerugian perusahaan tersebut mencapai 13,7 triliun rupiah (Senapan & Senapan, 2021).</p>

3	PT Timah Persero Tbk	<p>Kasus PT Timah Persero Tbk ini menguat kepermukaan setelah Direksi PT Timah Persero Tbk ini melakukan kebohongan public melalui media dengan mengatakan bahwa efisiensi dan strategi telah mengasilkan kinerja yang positif pada laporan keuangan semester 1-2015. Pada kenyataannya, semester 1-2015 terjadi kerugian sebesar Rp 59 miliar. Tidak hanya itu ternyata peningkatan utang mencapai 100% dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2013, utang Perseroan hanya Rp 235 miliar. Namun jumlah utang ini meningkat hingga Rp 2,3 triliun pada tahun 2015.</p> <p>(https://www.tambang.co.id).</p>
---	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas dapat dilihat bahwa masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran etika. Jika dilihat dari sisi etika akuntansi, manajemen laba merupakan salah satu masalah penting dalam dunia bisnis. Etis atau tidaknya manajemen laba dilihat dari sudut pandang tercapainya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kewajiban pihak terkait. Manajemen laba akan menjadi tidak beretika ketika dilakukan dalam menghadapi tekanan persaingan untuk menunjukkan kinerja tinggi

dengan laba yang tinggi serta adanya perilaku *oportunistik* manajemen. Manajer yang *oportunistik* ketika laba perusahaan dikaitkan dengan kompensasi manajer, manajer akan *oportunistik* untuk meningkatkan laba dengan memanipulasinya, bukan karena akrual yang tidak terhindarkan. Sehingga dengan hal seperti itu laporan keuangan menjadi terdistorsi, pada hal informasi pada laporan keuangan digunakan oleh *stakeholder*. Hal ini menjadikan bahwa perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer menjadi tidak etis (Wati et al., 2023).

Pihak manajemen cenderung melakukan praktik manajemen laba dengan upaya meminimalkan pembayaran pajak dengan membuat beban pajak menjadi sekecil mungkin. Upaya ini disebut dengan perencanaan pajak. Perencanaan Pajak merupakan upaya wajib pajak untuk mencapai pembayaran beban pajak yang efisien dengan meminimalkan pembayaran beban pajak dengan tidak melanggar ketentuan yang telah diatur didalam undang-undang perpajakan Kanji (2019). Oleh karena itu manajemen perusahaan menggunakan teknik manajemen laba agar bisa mencapai target. Berbagai tindakan dilakukan oleh perusahaan untuk merencanakan pajaknya dengan memanipulasi aktivitas perusahaan (*real earning management*).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi manajemen laba yaitu aset pajak tangguhan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 menyatakan bahwa aset pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai bentuk akibat adanya perbedaan akumulasi rugi pajak, selain itu perusahaan

diberikan kebebasan dalam menentukan kebijakan akuntansi yang dapat digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan dalam laporan keuangan, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasi adanya tindakan manajemen laba. Semakin tinggi jumlah aset pajak tangguhan semakin tinggi pula tingkat kemungkinan manajemen laba. Sebab terjadinya aset pajak tangguhan ini dikarenakan adanya perbedaan yang disebabkan koreksi yang positif yang mengakibatkan terjadinya beban pajak dimana menurut akuntansi keuangan nilainya kebih kecil dibandingkan menurut akuntansi pajak, dan kemudian dikarenakan adanya perbedaan temporer pada laba akuntansi keuangan dengan laba akuntansi pajak yang berakibat kepada perusahaan yang dapat menunda pajak terutang dimasa depan (Silalahi & Ginting, 2022).

Kemudian faktor selanjutnya yang mendorong pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba yaitu, beban pajak tangguhan. Beban Pajak Tangguhan timbul akibat adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Laba yang dilaporkan manajemen bukan hanya pertanggung jawaban kepada *stakeholder* saja melainkan untuk kepentingan otoritas pajak juga. Beban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam memanipulasi laporan keuangannya. Sedangkan dalam beban pajak tangguhan dijelaskan bahwa suatu beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk dapat melakukan manajemen laba karena beban pajak tangguhan dapat menurunkan tingkat laba dalam perusahaan (Marbun & Marthinus, (2021).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba yaitu *leverage*. *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, jika perusahaan dibubarkan (Nugraha & Wirajaya, 2024). *Debt to equity ratio* (DER) adalah perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri atau ekuitas dalam pendanaan perusahaan. Semakin tinggi rasio *Debt to Equity Ratio* (DER), semakin tergantung perusahaan pada pihak eksternal (kreditur) dan semakin besar beban biaya hutang yang harus ditanggung perusahaan. *Leverage* adalah ukuran untuk menghitung jumlah aset perusahaan yang dibiayai dengan utang serta mencerminkan kaitan antara hutang perusahaan terhadap modal dan aset. Tingginya tingkat *leverage* menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki perusahaan tersebut semakin tinggi pula (Al Thaaf & Munandar, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia et al. (2020) menyatakan bahwa hubungan perencanaan pajak dengan manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut penelitian Rfandy & Andy (2021) Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut Geo Putri et al (2023) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba.

Penelitian mengenai aset pajak tangguhan yang dilakukan oleh Putra (2019) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Menurut Penelitian Rfandy & Andy (2021) Aset Pajak.

Tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Geo Putri et al (2023) juga menyatakan aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani & Sulistyowati (2021) menunjukkan bahwa variabel beban pajak tangguhan memiliki nilai positif signifikan yang berarti variabel beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen laba. Begitu juga dengan penelitian Putra (2019) menyatakan bahwa Beban Pajak Tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba karena dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena beban pajak tangguhan dapat menurunkan tingkat laba dalam Perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “**Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan, dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Melalui Leverage Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba agar terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

2. Dengan adanya praktik manajemen laba, laporan keuangan yang disajikan mungkin tidak mampu menggambarkan kondisi atau kinerja perusahaan sesungguhnya.
3. Praktik manajemen laba yang dilakukan dapat menimbulkan upaya perencanaan pajak.
4. Pihak manajemen melakukan manajemen laba dengan cara meminimalkan laba agar bisa membayar pajak dengan lebih rendah.
5. Beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi perusahaan untuk dapat melakukan praktik manajemen laba, karena beban pajak tangguhan mungkin bisa dapat menurunkan tingkat laba didalam Perusahaan.
6. Kebijakan Perpajakan dan standart akuntansi memberikan kesempatan bagi Perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.
7. Perusahaan selalu berusaha untuk mengurangi jumlah laba kena pajak dengan tujuan untuk menjaga agar pajak tetap rendah sehingga bisa merugikan negara.
8. Adanya Kecenderungan *leverage* dari sebuah perusahaan yang semakin tinggi mengakibatkan adanya manajemen laba.
9. Aset pajak tangguhan memungkinkan Perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam merekayasa laporan keuangannya.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti menetapkan batasan masalah agar pembahasan yang dilakukan tidak terlalu luas dan lebih terarah, karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis hanya akan meneliti Perencanaan Pajak (X1), Aset Pajak Tangguhan (X2), dan Beban Pajak Tangguhan (X3) Terhadap Manajemen Laba (Y) Melalui *Leverage* (Z) Sebagai Variabel Moderasi Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024?
4. Bagaimana pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba dengan *Leverage* sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024?

5. Bagaimana pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba dengan *Leverage* sebagai variable moderasi pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024?
6. Bagaimana pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba dengan *Leverage* sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024.
4. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba dengan *Leverage* sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024.

5. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba dengan *Leverage* sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024.
6. Untuk mengetahui pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba dengan *Leverage* sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024.

1.6 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki manfaat tersendiri, baik untuk diri peneliti sendiri maupun pihak-pihak yang berhubungan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Penulis dapat memperluas pengetahuan untuk mendalami ilmu manajemen laba serta dapat memahami bagaimana mengimplementasikan perencanaan pajak, aset pajak tangguhan, dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba melalui *leverage* sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat mengidentifikasi berbagai strategi perencanaan pajak yang mungkin tercermin dalam pembentukan asset dan beban pajak tangguhan yang mempengaruhi praktik manajemen laba. Hasilnya dapat memberikan wawasan bagi perusahaan dalam

merancang strategi pajak yang tidak hanya efisien secara fiskal tetapi juga mempertimbangkan implikasinya terhadap pelaporan keuangan dan persepsi investor.

Dan penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan, mempertimbangkan dengan matang dalam mengambil suatu keputusan, terutama mengenai permasalahan yang teliti. Sehingga, keputusan terbaik akan membawa hasil terbaik bagi perusahaan, menghindari segala resiko kerugian dan memaksimalkan keuntungan perusahaan.

3. Bagi Akademis

Sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perencanaan pajak, asset pajak tangguhan, dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba melalui *leverage* sebagai variabel moderasi dan landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi perpajakan dan manajemen laba.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat.

5. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bisa memberikan gambaran tindakan perusahaan terhadap pembayaran pajak penghasilan maka dari itu pemerintah bisa lebih memperbaiki lagi pengawasan perpajakan sehingga perusahaan bisa lebih patuh dalam melakukan pembayaran pajak yang akan menambah

pendapatan kas negara. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai acuan dalam melihat tindakan perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024.